

Anak Agung Gede Oka Wisnumurti

**Demokrasi Prosedural
dan Semangat Kerakyatan**
Literasi Politik Era Reformasi

Pengantar : AAGN Ari Dwipayana

Warmadewa University Press
Denpasar, 2018

Sanksi Pelanggaran

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidanan dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memarkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Anak Agung Gede Oka Wisnumurti

Demokrasi Prosedural dan Semangat Kerakyatan

Literasi Politik Era Reformasi

Pengantar : AAGN Ari Dwipayana

Editor : Arya Suharja
Lembaga Studi Sanatanagama
Co-editor : Nyoman Landra
Desain Sampul : Pektif Design
Penata Letak : Nyoman Landra

Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Judul : Demokrasi Prosedural dan Semangat Kerakyatan:
Literasi Politik Era Reformasi
Penerbit : Warmadewa University Press
Kota : Denpasar
Tahun Terbit : 2018
Penulis : Anak Agung Gede Wisnumurti
Pengantar : A.A. G.N. Ari Dwipayana
Editor : Arya Suharja
Spesifikasi : xxii + 298 halaman : 16 x 24 cm
Kategori : Politik, Kehidupan Demokrasi
Pendidikan Politik, Politik Lokal Bali Awal Reformasi
ISBN : 978-602-1582-29-9

DAFTAR ISI

Isi	Hal
Prakata Editor	ix
Kata Pengantar Penulis	xii
Pengantar AAGN Ari Dwipayana	xvii
Bagian Pertama : Esai	1
1. Menjaga Komitmen	2
2. Gelagat Di Balik Amandemen	6
3. NKRI Harga Mati	10
4. Dinamika Politik Lokal	13
5. Polarisasi Politik	17
6. Rejuvenasi Politik Aliran	20
7. Menang Saat “ <i>Injury Time</i> ”	24
8. Mengakomodasi Kepentingan Ideologi	28
9. Pemilihan Langsung	32
10. Teruji di Lapangan	36
11. Menghindari Politisasi Penegakan Hukum	38
12. Momentum Bangkitkan Jati Diri.....	43
13. Jaminan akan Rasa Aman	47
14. Merumuskan Kebijakan yang Retrospektif	51
15. Akuntabilitas Penyusunan APBD	55
16. Kesempatan Lembaga Peradilan	59
17. Bantuan Pemerintah Dan “ <i>Bargaining</i> ” Politik	63
18. Efektifitas Kunker Gubernur	67
19. Idealisme “ <i>Sepi Ing Pamrih</i> ”	71

20. Nasib Partai-Partai Kecil	75
21. Kembali Ke Jati Diri	79
22. Alat Hegemoni	82
23. Menuju Pemilu Berkualitas	86
24. Titik Rawan Pemilu	90
25. Suara Rakyat	25
26. Ketika Harus Memilih	99
27. Bursa Calon Presiden	103
28. Pengingkaran Komitmen Kebangsaan	107
29. Memecahkan Masalah Tanpa Masalah	112
30. Dusta Diantara Kita	116
31. Pemanasan Politik	120
32. Cengkeraman Kapitalisme Global	124
Bagian Kedua : Wawancara	129
33. “Vote Getter” Sekadar Mesin Suara	130
34. Target 48 Persen Sudah Maksimal	134
35. PDI Perjuangan Enam, Partai Golkar Tiga	139
36. Masyarakat Sudah Tahu Partai Status Quo	142
37. Praktik Nepotisme Rugikan Parpol	145
38. Kesepakatan PDI Perjuangan-Golkar, Kenapa tidak?	148
39. Agar Diperhitungkan, PKP Bali Perlu Waktu	151
40. “Itu Seruan Moral dan Etika Politik”	156
41. PDI Memiliki Prospektus Masa Depan, Asal	159
42. “Politik Sama Dengan Bisnis, Modalnya Kepercayaan” ..	161
43. Masyarakat Takkan Serta Merta Memilih Golkar	166
44. Rakyat Masih Mengagumi Masa Lalu	170
Bagian Ketiga : Berita	173
45. Suara Tak Sah Pemilu 1997 - Karena Tak Tahu Atau Disengaja	174

46. Tantangan Peradiah Masa Datang - Pelecehan Dan Eksploitasi Simbol Agama	177
47. Utang Peradiah Harus Dijelaskan Transparan	180
48. Waspada! Siluman Politik Dalam Gerakan Reformasi	182
49. Marhaenisme Relevan Hadapi Tantangan Masa Depan ...	185
50. Dari Diskusi GMNI Denpasar - Pemikiran Bung Karno Muda Layak Dihidupkan	187
51. Pemilihan Langsung Bisa Menjebak	189
52. DPRD Akan Pertimbangkan Hasil Debat Kelompok Independen	191
53. Penghitungan Jajak Pendapat Peradiah akan Diawasi Kritis	193
54. Hasil Sementara Jajak Pendapat Peradiah - Dewa Made Beratha Memimpin	195
55. Dari Diskusi di DPRD Denpasar - Ekstra Parlementer Masih Diperlukan	197
56. Pemilu Harus Berlangsung Secara Reguler - Komunikasi Politik Terimpotensi	199
57. Di Bali Disiapkan 10.000 Sukarelawan	202
58. "Cepat Diproses, Sehingga Tahu Pelakunya"	204
59. Soal Ancaman Tjok. Pemecutan - Bisa Jadi Senjata Makan Tuan	207
60. Pemilu Multi Partai Berpotensi Timbulkan Konflik di Desa Adat	210
61. Simbol Figur, Target Para Pengacau	213
62. Bukan Wewenang Panwaslu: Soal Klaim Wilayah Bebas Atribut Parpol	215
63. Batas Pendaftaran Pemilih Mundur, Kesankan Panitia Kurang Siap?	217
64. Cegah Konflik Perlu Komunikasi Integratif	219
65. Penyerahan DCS Diundur hingga 12 Mei - Pemilih Di Bali 91,8 Persen	221
66. Dampak Politis Pengunduran Jadwal Tahapan Pemilu ...	224

67. Disepakati, Waisak tak Ada Kampanye	227
68. Pemilu Sukses, Gusur Kelompok Status Quo	230
69. DCS Bali AmandariProtes	234
70. Soal Penolakan Jadwal Kampanye PPD I - Bisa Timbulkan Bentrok Massa	236
71. Evaluasi Kampanye Putaran Pertama di Bali - Elite Bikin Kesepakatan Massa Bikin Ulah	239
72. Bentrok Massa Parpol Bisa Membesar dan Meluas - Golkar dan PDI-P Langgar Empat Aturan	243
73. Di Balik Kemelut Politik di Gianyar - Kelompok Frustrasi PDI-P Berupaya Jatuhkan Suryawan?	246
74. Harus Profesional dan Punya Visi Jelas	249
75. Langkah Mundur, Jika Humas Badung Dilikuidasi	253
76. Sembrono, Humas Badung Kok Dilikuidasi	256
77. Jika Pemilu Gagal Bisa Melalui Dekrit	259
78. Selama Orba, Rakyat Krisis Figur	263
79. Daftar Bacaan	267
80. Indeks	277

Prakata Editor

Segala puja dan puji pangastungkara kita persembahkan dihadapan Sang Hyang Parama Kawi/Tuhan Yang Maha Pujangga, karena hanya atas karuniaNya buku “Demokrasi Prosedural dan Semangat Kerakyatan: Literasi Politik Era Reformasi” ini dapat hadir di hadapan Pembaca.

Sebagaimana telah diketahui publik, sebelum dikenal sebagai Anggota Panitia Pemilihan Daerah (PPD), Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) Provinsi Bali dan kemudian memajukan Universitas Warmadewa melalui perannya sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Bali (YKPB), Anak Agung Gede Oka Wisnumurti lebih dulu dikenal sebagai pengajar di FISIP Universitas Warmadewa dan pengamat politik yang aktif. Ia memiliki pemikiran jernih dan perspektif yang memperkaya berbagai wacana politik dan kebudayaan. Ia juga aktif sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Bali (1994-1997) dan kemudian menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah Indonesia) masa bhakti 1997-2000.

Posisi dan peran yang dimainkannya memiliki makna historis, karena konteks masa dan momentum sejarah. Ia berada di tengah pusaran perubahan dalam posisi sebagai intelektual, yang meraih kesempatan untuk berperan sebagai

intelektual yang terlibat, dan mendapat amanat untuk menjadi aktor dalam lembaga pemilihan umum (Panitia Pemilihan Daerah dan Komisi Pemilihan Umum).

Posisi dan peran ini terdokumentasi dalam serakan kliping esai, opini, kliping berita dan wawancara di berbagai media massa cetak, terutama media cetak lokal. Kliping ini menjadi dokumentasi literer yang mencatat berbagai perspektif atas sejumlah peristiwa penting di tengah perubahan sosial-politik yang berlangsung.

Posisi dan peran Anak Agung Gede Oka Wisnumurti sangat unik, ia memiliki jarak yang aman untuk mengamati dan menyumbangkan perspektif, tetapi dari dimensi kesejarahan kita menemukan bahwa literasi politik yang dikembangkannya, sumbangannya kepada pendewasaan pandangan dalam meninjau politik, diperkaya sekaligus dengan keterlibatan dalam pematangan proses politik yang berlangsung.

Sejarah perpolitikan Bali yang sebelumnya diwarnai berbagai kisah kekerasan politik, patronase dan eksploitasi satuan-satuan kemasyarakatan tradisional, kooptasi dan diskriminasi oleh kekuatan dominan, perlahan tetapi pasti wajah perpolitikan Bali bergeser menuju arah baru yang makin menjanjikan, yaitu kesadaran politik baru dan kedewasaan.

Buku bunga rampai ini menyajikan kembali tidak saja esai, tetapi juga percikan pemikiran Anak Agung Gede Oka Wisnumurti di dalam berbagai pemberitaan dan wawancara, menanggapi berbagai isu maupun memperkaya wacana publik dengan mengetengahkan perspektif yang mencerdaskan. Tadinya, sebagai editor, saya telah mencoba mengklasifikasi kontennya, tetapi di tengah perjalanan, tampak bahwa cara ini bukannya mempermudah pembaca memahami konteks setiap wacana. Pengelompokan membuat konten terlepas dari konteks masa, terpisah-pisah dengan konteks peristiwa, event politik, maupun keterkaitannya satu sama lain dari segi kronologi. Penyajian secara kronologis dipilih untuk memudahkan pembaca dan peneliti yang hendak memperdalam kajian

mengenai kehidupan sosial politik Bali pada periode awal Era Reformasi itu.

Prakata ini mesti ditutup dengan sebuah maklumat. Bahwa Editor berusaha menjaga otentisitas naskah asli yang telah dipublikasikan. Karenanya beberapa kata ataupun nama di dalam Indeks, termasuk nama Penulis, dapat muncul lebih dari satu entry, karena figur yang sama kerap ditulis dengan nama yang tidak lengkap, atau satu frase ditulis secara berbeda. Bahwa mengingat sifat esai, wawancara dan berita yang terangkum dalam bunga rampai ini, Penulis tidak selalu merujuk secara langsung kepada teori, pendekatan atau pemikiran tertentu yang menjadi acuannya. Penyajian Daftar Bacaan dari kepustakaan Penulis, dan indeks di bagian akhir, diharapkan membantu pembaca dalam menelusuri data, alur pemikiran, perspektif, pendekatan, atau teori yang memberi bobot kepada perspektif dan pemikiran Penulis.

Semoga buku ini bermanfaat dalam meneruskan literasi politik masyarakat, memperkuat sendi-sendi kehidupan sosial dan turut menyalakan terus api semangat kerakyatan. Dirgahayu.

Denpasar, Februari 2018.

Editor

Kata Pengantar Penulis

Ada adagium dalam Ilmu Sejarah yang menyatakan bahwa sejarah adalah politik di masa lalu, dan politik adalah sejarah yang sedang berlangsung. Bagi saya, pernyataan ini menemukan maknanya ketika membaca kembali percikan pemikiran yang dimuat beberapa media massa cetak. Pemikiran itu terekam dalam serial tulisan rubrik Orasi yang terbit setiap Jum'at di Harian Bali Post, sejumlah wawancara, berita, makalah dan juga esai lepas yang dimuat di beberapa media cetak.

Setiap tulisan dalam antologi ini mesti dibaca dalam konteks masa, peristiwa, bahkan episode dalam proses sejarah yang sedang berlangsung saat itu. Hampir setiap tulisan dan materi wawancara dalam buku ini merupakan catatan, komentar, cetusan gagasan, bahkan sebagian bersifat *forecast*, prediksi atas bagian sebuah proses politik yang belum selesai. Karenanya kumpulan tulisan ini memiliki keunikan tersendiri. Ia dapat dibaca sebagai catatan kaki dari sejarah kontemporer republik ini, sebagai wakil dari suara cendekiawan politik yang jauh dari episentrum namun disemangati usaha mengedepankan kejernihan dalam meninjau berbagai peristiwa politik, termasuk di dalamnya isu-isu strategis di pentas nasional dan internasional.

Pemikiran-pemikiran itu sebagian disampaikan lugas dalam bahasa yang mudah dipahami pembaca, dan untuk

sebagian memperkenalkan konsep, pendekatan dan idiom-idiom yang --bisa jadi-- baru bagi masyarakat awam. Untuk sebagian barangkali akan terasa sebagai representasi euphoria keterbukaan, mewakili pemahaman dan harapan rakyat, juga jembatan yang menghubungkan konstruksi nilai, norma dan prosedur demokrasi yang sedang dilembagakan *vis a vis* (saling berhadapan dengan-) pemahaman awam dan ekspresi semangat kerakyatan. Esai-esai dalam antologi ini terbangun sebagai dokumentasi literer pembelajaran politik melalui respon atas isu-isu politik aktual. Representasi era yang berubah cepat serupa itulah yang melatarbelakangi judul “Demokrasi Prosedural dan Semangat Kerakyatan: Literasi Politik Era Reformasi” ini.

Banyak terjadi perubahan dalam dua dasawarsa setelah Reformasi bergulir di Indonesia. Semangat perubahan yang bergelora di awal Reformasi menemukan berbagai bentuk implementasi dalam dinamika sosial-politik, terutama dalam tataran peraturan perundang-undangan berhadapan dengan tataran praksis. Agenda pembaruan norma-norma yang mengatur jalannya suprastruktur politik dan infrastruktur politik terlaksana dalam wacana terbuka, tarik-menarik kepentingan yang massif dan dalam percepatan tinggi.

Percaturan wacana di tataran akademik dan media massa menggambarkan bahwa meski tertatih, peranan intelektual berusaha didorong sekuat tenaga mengimbangi pertarungan kepentingan dalam perumusan tatanan baru kehidupan kenegaraan; Melampaui wacana, terjadi juga eskalasi riak-riak yang berkembang menjadi gelombang di daerah yang jauh dari pusat kekuasaan. Peristiwa politik lokal tidak jarang menjadi muara dari agenda elit politik dalam bentuk-bentuk konfigurasi peristiwa politik lokal yang ekstrem. Dalam ungkapan sinikal, gejala ini kerap digambarkan: “Elit partai yang minum tuak di Jakarta, massa partai mabuk di Bali”.

Dalam konstelasi serupa itu, saya beruntung memperoleh momentum sejarah, terpanggil menjadi intelektual yang aktif dalam literasi politik, pelaku sejarah yang pernah menjadi

anggota aktif Panitia Pemilihan Daerah (PPD) dari unsur independen, memimpin Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali dan kini dipercaya sebagai Ketua Yayasan Kesejahteraan KORPRI Provinsi Bali. Saya berangkat sebagai seorang cendekiawan muda, aktifis organisasi kemasyarakatan dan gerakan pemuda, serta peran sosial baru: pengamat politik. Pandangan-pandangan itu saya ungkap dalam berbagai opini, komentar dan pemberitaan media massa.

Saya beruntung dibesarkan dalam pola asuh yang terbuka, dididik untuk mengatur jarak aman dan sedapat mungkin menyumbangkan perspektif yang jernih, sehingga dapat menyuarakan pandangan yang meletakkan demokratisasi sebagai wacana yang niscaya bagi rakyat biasa. Bahwa politik dapat dan mesti menjadi keniscayaan, menjadi bagian dari keseluruhan keutuhan kehidupan sehari-hari masyarakat, dan dengan demikian berfungsi dalam perumusan cita-cita sosial yang dapat diikuti nalar awam, sejalan dengan kemurnian di balik kesederhanaan jalan fikiran orang biasa.

Catatan kritis dan fungsi moderasi ini bagi saya adalah pembuktian bahwa Bali tidak sepenuhnya berada di pinggir gelanggang, dan hanya menjadi sekadar “keterangan tempat” dari Kongres/Munas/Rakernas hampir semua partai politik besar dan berbagai *event* sosial-politik penting yang terjadi di Pulau Dewata. Melalui kesempatan sejarah yang ada saya berusaha ikut mengambil peran mengawal proses demokrasi di daerah, dengan intens terlibat dalam tataran praksis untuk membuat proses demokrasi menjadi peristiwa biasa, suatu kontestasi yang jauh dari suasana tegang, apalagi menjadi muara permusuhan laten yang mencari-cari bentuk baru.

Pada periode saat tulisan dan komentar-komentar dalam buku ini dicetuskan, saya sesungguhnya tidak pernah berhenti mengamati, memahami, dan menemukan semangat yang hidup di tengah masyarakat, terutama masyarakat Bali. Di balik berbagai peristiwa dalam sejarah kebudayaan Bali, kita menemukan dinamika sosial-politik yang luar biasa, bahkan ekstrem. Disharmoni bahkan konflik, integrasi dan disintegrasi

yang terjadi silih berganti, pendudukan dan penjajahan, peperangan dan revolusi, “perang saudara” menyusul bencana alam yang dahsyat, seluruhnya pernah terjadi dalam suatu kurun waktu yang tidak lama. Luka dan trauma politik dengan mudah dapat kita temukan dalam berbagai cara ungkap. Sebaliknya, kita juga menemukan semangat kerakyatan yang relatif utuh, terjaga dalam tradisi kecil Pakraman. Tradisi yang memiliki akar yang kuat dalam disiplin sosial, keswadayaan, kreatifitas dan kecenderungan estetik. Pakraman relatif kedap dari pengaruh perubahan besar yang datang silih berganti. Hal ini membangkitkan optimisme bahwa demokrasi memiliki harapan dan masa depan di pulau ini.

Buku “Demokrasi Prosedural dan Semangat Kerakyatan: Literasi Politik Era Reformasi” ini merangkai pemikiran dalam periode transisi itu menjadi suatu buku antologi pemikiran yang dikehendaki dapat menggambarkan peranan intelektual dalam mengawal dinamika perpolitikan, mengetengahkan urgensi politik akal-sehat, dan eksperimentasi bahwa demokrasi sungguh-sungguh dapat menjadi peristiwa kerakyatan yang biasa, normal, “pesta demokrasi” yang jauh dari disharmoni atau bahkan konflik.

Saya menghargai prakarsa dan proses yang dilalui Editor dalam menyusun dan menyajikan kembali percikan pemikiran ini. Editor menjadikan antologi ini sebagai sebetuk catatan historis yang menunjukkan peranan intelektual dalam proses demokratisasi; Teks dalam bunga rampai ini dapat dibaca dalam konteks yang real, bahwa dengan persepsi politik yang berdasar akal sehat, semangat kerakyatan dapat menemukan momentum sejarahnya untuk menjadi. Meski resultannya kerap jauh panggang dari api, tetapi proses historis ini mesti terus dikawal.

Antologi ini juga dapat menguji relevansi dan urgensi berbagai pemikiran pada periode penting dalam kehidupan kemasayarakatan, kenegaraan dan kebangsaan itu; Dalam hal ini saya mesti rendah hati di hadapan “pengadilan” sejarah. Sepotong peran yang telah menjadi jejak ini, bisa jadi hanya merupakan

catatan kaki semata, atau sebetuk kesaksian atas proses perubahan yang historis, atau menjadi catatan atas peran yang berusaha saya tunaikan sakasidan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja penunaian bagian peran saya ini tidak berdiri sendiri, karena begitu banyak teman seperjuangan yang menjadi teman diskusi, mitra dalam mengembangkan wacana kritis, bahkan bersama-sama ikut mematangkan gerakan perubahan. Saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh sahabat dalam *intellectual exercise* yang cukup panjang ini, dalam pengembangan wacana kritis, pematangan gerakan, pun penataan struktur dan kultur politik baru yang menjadi kesepakatan-kesepakatan politik pasca Reformasi.

Tegur sapa berupa masukan atau kritik saya harapkan dapat menyempurnakan percikan pemikiran dalam buku ini, agar pada saatnya dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi studi yang utuh mengenai periode penting dalam sejarah politik negeri ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada istri dan anak-anak yang telah menemani dengan tabah dan setia, yang memungkinkan saya bertumbuh dan melalui periode demi periode penugasan dan penunaian peran sosial saya. Demikian juga penghargaan dan terima kasih kepada seluruh sahabat dalam suka dan duka, dalam aktifitas organisasi, dalam wacana kritis pergerakan, dalam diskursus ilmiah di kampus, dalam penunaian swadharma pada lembaga pemilihan umum maupun pada lembaga penyelenggara perguruan tinggi. Saya tidak dapat menyebut satu persatu demikian banyak teman dalam jejaring dan komunitas dimana saya bertumbuh. Kepada mereka semua buku ini saya persembahkan.

Semoga persembahan ini bermanfaat dan memberi sumbangan kepada perkembangan kehidupan demokrasi sebagai perwujudan semangat kerakyatan. Swaha.

Denpasar, 27 Februari 2018.

Anak Agung Gede Oka Wisnumurti.

KEMBALI KE POLITIK AKAL SEHAT: DEMOKRASI DI ERA *POST-TRUTH POLITICS*

Pengantar AAGN Ari Dwipayana

Buku ini hadir dihadapan Anda, ketika banyak orang, termasuk akademisi politik, khawatir dengan munculnya era *Post-truth* (pascakebenaran). Pada tahun 2016, Kamus Oxford mentasbihkan kata *post-truth* sebagai *word of the year 2016*. Jumlah istilah itu meningkat 2.000 persen dibandingkan tahun 2015.

Ralph Keyes dalam bukunya *The Post-truth Era* (2004) mempopulerkan istilah tersebut dengan menghubungkannya dengan istilah *truthiness*, yang diartikan sebagai sesuatu yang seolah-olah benar, meski tidak benar sama sekali. Di era *post truth*, politik menjadi sangat erat kaitannya dengan menggerakkan dan menggelorakan emosi. Keyakinan dan perasaan personal menjadi lebih penting dibandingkan dengan fakta. Itulah sebabnya, kamus Oxford menjelaskan terminologi ini sebagai situasi dimana keyakinan dan perasaan pribadi lebih berpengaruh dalam pembentukan opini publik dibandingkan fakta-fakta yang obyektif.

Mengapa *post-truth politics* bisa tumbuh subur di era Milineal seperti saat ini? Bukankah di era *internet of things*, orang dengan mudah mengakses data dan informasi dari berbagai sumber? Bukankah di era digital ini, orang juga tidak perlu tergantung pada satu sumber informasi? Nah, disitu letak persoalannya.

Era digital memang menyajikan kecepatan dan volume informasi yang datang begitu bertubi-tubi, memenuhi bilik-bilik penyimpanan informasi di otak kita atau bahkan informasi yang kita terima bisa sampai meluber. Dengan melubernya informasi itulah, *post-truth politics* bisa bekerja dengan lebih leluasa. Karena ditengah melubernya informasi itu, kita tidak sempat berpikir kritis terhadap informasi yang berseliweran, atau melakukan mekanisme verifikasi kebenaran atas informasi yang dihadirkan.

Bagaimana cara kerja *post-truth politics*? Para politisi dengan didukung oleh konsultan politik maupun *cyber army* mereka, mulai menciptakan dan mereproduksi informasi bohong, baik narasi maupun gambar, dengan tujuan menyentuh ruang-ruang emosi personal dari publik. Sehingga selanjutnya akan membangkitkan sentimen-sentimen tertentu yang dikehendaki. Ruang-ruang emosi ini memang tertanam dalam diri setiap orang, tertancap di alam bawah sadar, termasuk juga perasaan aman atau tidak aman. Kedua jenis perasaan tersebut akan membentuk insting survivalitas setiap orang. Misalnya, ketika orang merasa terancam, maka dia akan bereaksi terhadap ancaman tersebut.

Baru-baru ini, kita dikejutkan oleh cara kerja sebuah lembaga konsultan politik, *Cambridge Analytica*, yang melalui teknik algoritma mendapatkan banyak data-informasi terkait dengan profil personal pengguna jejaring media sosial termasuk apa yang tertanam di alam bawah sadar pengguna medsos. *Cambridge Analytica* bisa mengetahui berbagai hal seperti ras, gender, orientasi seksual, bahkan trauma masa kecil. Data inilah yang selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk merancang strategi kampanye terutama dalam menentukan target pengguna individual dengan “pemasaran personal” yang bisa menyentuh emosi personal serta untuk mengubah pandangan politiknya.

Dalam *post-truth politics*, pemilih adalah target pemasaran personal yang disentuh ruang-ruang emosinya. Sehingga, ketika insting survivalitasnya disentuh dengan narasi dan gambar

maka diharapkan akan mempengaruhi pandangan politiknya. Itulah sebabnya para politisi yang menggunakan teknik ini akan terus menerus menghadirkan narasi dan gambar yang memobilisasi emosi pemilih yakni: membangkitkan rasa tidak aman ataupun terancam.

Ada satu film menarik yang menggambarkan penggunaan strategi memobilisasi emosi pemilih terkait rasa tidak aman ini. Filmnya berjudul *Our Brand is Crisis*. Film itu menceritakan strategi kampanye seorang kandidat Presiden di sebuah negara di Amerika Latin untuk mengangkat narasi secara terus menerus bahwa negara sedang mengalami krisis. Strategi cukup efektif menyerang insting survivalitas pemilih karena pemilih merasa negaranya terancam bangkrut dan masa depannya menjadi suram.

Teknik menciptakan rasa tidak aman sebagai strategi politik, bukan hanya menggunakan narasi ekonomi. Tetapi juga bisa mengeksploitasi sentimen-sentimen yang selama ini terpendam dalam masyarakat. Misalnya, hilangnya kedaulatan negara, ancaman kehilangan pekerjaan oleh tenaga kerja asing, mengangkat kembali trauma-trauma sejarah yang menyakitkan di masa lalu, sampai pada penggunaan sentimen keterancaman suku, agama dan ras.

Sentimen keterancaman itulah yang dibangkitkan melalui *hoax* atau berita bohong yang mudah direproduksi melalui jaringan media sosial. Dengan sebuah gawai, seseorang bisa melakukan *screen capture* atau membuat meme-meme provokatif, lalu mengunggahnya di media sosial untuk membangun opini publik. Dengan gawai yang sama, seseorang bisa mengedit foto, video ataupun berita, lalu diproduksi massal dengan *framing* tertentu. Dengan gawai yang sama, seseorang juga bisa merekayasa fakta pada ruang dan waktu tertentu, lalu dikemas sebagai narasi dalam lingkup yang lebih luas, dengan tambahan bumbu yang sensasional agar mudah dipercaya oleh banyak orang.

Akibatnya, masyarakat menjadi terbelah. Segregasi sosial

semakin tajam. Sikap kami (*in group*) dengan mereka (*out-group*) dalam masyarakat semakin mengental. Menciptakan kelompok-kelompok pendukung yang fanatik, pemarah, gampang memaki dan cepat tersinggung. Ruang politik diisi oleh *twit war* yang tidak pernah selesai. Meme-meme diproduksi untuk menimbulkan amarah dan kebencian.

Dalam situasi seperti ini, fakta bukanlah sesuatu yang penting. *Hoax* adalah anak kandung *post-truth politics* dimana data menjadi artifisial, siap dipoles dan dikonstruksi untuk memperkuat narasi politiknya. Gambar juga dipotong-potong untuk menyerang lawan politiknya. *Hoax* disebar terus menerus sehingga dianggap menjadi kebenaran. Ketika sudah terpapar oleh kebenaran artifisial ini, maka munculah kelompok pendukung politik yang fanatik serta bebal dengan realitas dan fakta-fakta. Inilah cara berpolitik di era *post-truth*.

Berkelidan dengan Populisme

Fenomena *post-truth* tidak muncul secara tunggal. *Post-truth* juga berkaitan erat dengan populisme, suatu strategi politis yang berpihak pada rakyat (kecil). Walaupun populisme merupakan sebuah *contested concept*, tapi ada ciri yang esensial dari strategi populisme, yakni: *primacy of the people*. Selanjutnya, konsep ini direstorasi menjadi kehadiran seorang figur yang dianggap memiliki kepemimpinan yang kuat, baik dari kharismanya, daya tarik personalnya, maupun melalui pesan-pesannya yang bernada pro rakyat. Pemimpin populis juga ditampilkan sebagai pemimpin yang anti elite, anti kemapanan serta mewakili ekspresi kelompok yang merasa terasingkan atau termarginalkan selama ini.

Apakah populisme adalah tonic atau toxic bagi demokrasi? Sebagai kritik atas elitisme yang muncul dalam sistem demokrasi perwakilan, populisme disebutkan sebagai tonic, yang menyehatkan. Tapi, ketika populisme muncul sebagai strategi politik untuk kepentingan elektoral, propaganda politik, serta untuk menaikkan daya tarik personal untuk menarik kon-

stituen, maka populisme menjadi toxic bagi sistem demokrasi. Ini artinya, sebagai sebuah strategi politik, populisme seringkali digunakan oleh para politisi sebagai “barang dagangan” untuk menaikkan popularitas maupun elektabilitas.

Bagaimana cara kerjanya? Sampai disini muncul pertautan antara strategi populisme dengan *post-truth politics*. Pertama, politisi yang menggunakan strategi populisme selalu membangun narasi negara sedang dalam kondisi krisis melalui penyebaran fiksi, gambar dan juga berita bohong. Narasi “negara gagal” atau “negara lemah” ini diangkat terus menerus untuk menciptakan situasi keterancaman, dan juga rasa tidak aman yang meluas di publik.

Kedua, strategi populisme dilanjutkan dengan serangan yang gencar pada elite berkuasa yang dianggap sebagai pemimpin yang lemah, korup, tidak pro rakyat serta menjadi biang kerok terjadinya krisis. Ada beberapa narasi yang dibangun untuk memperkuat narasi populisme. Misalnya elite berkuasa diserang sebagai boneka kepentingan asing, sebagai antek-antek pemilik modal, serta kebijakannya yang merugikan rakyat dan sebagainya. Narasi ini jelas memanfaatkan cara kerja *post-truth politics*.

Ketiga, memunculkan figur yang dikonstruksikan sebagai pemimpin yang kuat dengan jargon dekat dengan rakyat, mewakili kepentingan rakyat dan menyebarkan pesan-pesan yang membela kepentingan rakyat. Singkatnya, populisme dipersempit menjadi tampilnya seorang figur pemimpin yang dipersepsikan akan bisa mengatasi krisis, bangkit dari kehancuran serta membawa rakyat dan negara kepada kejayaan.

Di era *post truth*, populisme sebagai strategi politik akan mendapatkan ladangnya. Untuk meningkatkan elektoral, dengan sangat mudah para politisi menciptakan narasi dan gambar yang berpijak pada fakta. *Our brand crisis*, bisa diciptakan sebagai barang dagangan. Begitu juga serangan bisa dilakukan tanpa memperdulikan fakta dan data tapi lebih menggerakkan dan menggelorakan emosi publik. Bahasa yang digunakan

seperti elite pembohong, elite penipu rakyat sangat mudah dilemparkan untuk memobilisasi sentimen pemilih. Fiksi tentang pemimpin yang kuat dibangun melalui politik pecintraan yang juga tidak pernah didukung rekam jejak yang jelas.

Kembali ke Politik Akal Sehat

Apakah kita bisa keluar dari jebakan *post-truth politics*? Saya melihat buku ini bisa menjadi refleksi bersama untuk kembali membangun politik akal sehat. Politik akal sehat adalah lawan dari politik pembodohan, yang menganggap rakyat hanya sebagai obyek propaganda yang gampang dimobilisasi emosinya untuk meningkatkan elektabilitas ataupun dukungan politik.

Untuk itu, demokrasi membutuhkan literasi politik yang mengajarkan warga agar tidak mudah mengkonsumsi informasi begitu saja tanpa mempertanyakan secara kritis: siapa yang menyampaikan informasi, apa kepentingan dibalik narasi tersebut dan siapa yang mendapatkan keuntungan dari narasi tersebut. Singkatnya, demokrasi membutuhkan bukan hanya *citizenship* tapi juga *netizenship*. Sehingga warganet tetap terbuka menerima informasi tapi kritis terhadap arus informasi yang secara deras menghantam dirinya. Kita merindukan warga negara yang tidak mudah dimobilisasi emosinya untuk kepentingan politik, dan selalu mengimbangi dengan melihat fakta, *check and recheck* informasi dan berpijak pada realita. Dengan cara seperti itu, saya yakin kita bisa merawat akal sehat di tengah era *post-truth politics*. Selamat membaca.

Jakarta, 30 Juli 2018